

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Rasio Pendapatan

a. Analisis Varians Pendapatan

analisis varians pendapatan provinsi nusa tenggara timur dari tahun 2019-2022 lebih kecil daripada anggaran, dengan 91,88% dikategorikan dalam kriteria kurang baik.

b. Rasio kemandirian

Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama periode 2019-2022 mengalami kenaikan. Namun tingkat kemandirian masih tergolong rendah karena masih terdapat peran dominan pemerintah pusat.

c. Rasio Desentralisasi

Kinerja Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT jika dilihat dari Rasio Derajat Desntralisai diketahui bahwa selama lima tahun periode 2019-2022 memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan rata-rata derajat desentralisasi ini menunjukkan bahwa BKD Provinsi NTT telah siap menjalankan otonomi daerah yang memegang prinsip desentralisasi.

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah pada Provinsi NTT masih sangat bergantung terhadap pendapatan transfer yang didapatkan dari pemerintah pusat.

e. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

kinerja keuangan pemerintah menurut rasio pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif. Perlu adanya optimalisasi sektor PAD di Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dimana sektor terbesar penyumbang PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

f. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas PAD Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dapat dikategorikan kurang efektif dengan rata-rata rasio sebesar 79,65%. Namun disisi lain, Pemerintah Daerah Provinsi NTT tetap harus mempertahankan PAD yang ada atau bahkan meningkatkan kembali PAD yang telah ada.

g. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efisiensi PAD Badan Keuangan Daerah

Provinsi NTT dapat dikategorikan efisien yang mana masih berada dalam skala interval <100% yang artinya lebih kecil.

h. Derajat Kontribusi BUMD

Derajat kontribusi BUMD Selama 4 tahun terakhir rasio dari tahun 2019-2022 dengan rata-rata sebesar 4,79% masuk dalam kriteria sangat rendah yang artinya bahwa tingkat kontribusi pemerintah provinsi nusa tenggara timur dalam mendukung pendapatan daerah belum terpenuhi sepenuhnya.

2. Rasio Belanja

a. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja tahun 2019-2022 persentase anggaran menunjukkan angka persentase tidak lebih kecil dari yang dianggarkan yang menunjukkan adanya penghematan anggaran belanja yang dilakukan oleh Badan Keuangan Provinsi NTT.

b. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja mengalami kenaikan pada belanja operasi dan menurun pada belanja modal. Dapat dijelaskan bahwa dari anggaran tahun 2019 sampai 2022 penggunaan pada Badan Keuangan Provinsi NTT terfokus pada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan aparatur serta belanja barang dan jasa.

c. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2019-2022 adalah sedang pada tahun 2019 mencakup presentase 10,9%, lalu pada tahun 2020

sebesar 9,6%. Lalu pada tahun 2021 sebesar 5,50% dan pada tahun 2022 presentase sebesar 4,81% yang artinya dapat disimpulkan pertumbuhan belanja pada provinsi ntt terbilang sedang karena mencakup nilai rata-rata 27,20%.

d. Analisis Efisiensi Belanja

Pengukuran efisiensi Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan efisiensi belanja mulai dari tahun 2019-2022 kurang dari 100% dimana semakin kecil rasio belanja semakin efisien, begitu pula sebaliknya, APBD akan efisien jika rasionya kurang dari 100%.

3. Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA

Rata-rata penggunaan silpa pemerintah provinsi NTT selama tahun 2019-2022 memiliki kinerja yang baik dengan persentase di atas 5% , akan tetapi perlu dimanfaatkan lagi untuk membiayai belanja daerah , dan Silpa positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah. Dapat dikatakan kinerja keuangannya sehat jika SiLPA yang berasal dari surplus anggaran, yang artinya realisasi penerimaan melebihi target sehingga penerimaan lebih besar dari belanja. Sedangkan kinerja yang dikatakan kurang sehat jika SiLPA terbentuknya dari banyaknya belanja yang tidak terealisasi akibat kurang baiknya perencanaan (Hidayat dan Ghozali, 2013)

6.2 Saran

- a. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah

Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi tenya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber- sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

- b. Hasil penelitian ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan variabel penelitian yang lain. Karena itu, kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengikutsertakan pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat inflasi dan pemetaan kota seperti wilayah manasajakah yang memberikan kontribusi positif dan negatif terhadap keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.